

PEMBENTUKAN KARAKTER ANTI KORUPSI PADA GENERASI Z DENGAN SISTEM ETIKA PANCASILA

Vella Adelia¹, Nelsy Helmilia Putri², Andini Ramadhani³, Muhammad Ricard Ginting⁴, Dhina Aprilia Ananda⁵, Rafly Armazumi⁶, Ilham Hudi⁷

Universitas Muhammadiyah Riau

vellaadelia0106@gmail.com¹ nelsiliaa@gmail.com² dhina.aprilia1234@gmail.com³ ilbambudi@umri.ac.id⁴
andini.ramadhani0711@gmail.com⁵ rarmazumi@gmail.com⁶ richardginting41@gmail.com⁷

Diserahkan tanggal 10 Desember 2024 | Diterima tanggal 10 Desember 2024 | Diterbitkan tanggal 19 Desember 2024

Abstract:

Currently, many studies have concluded that one of the main roots of corruption is the political system and political parties. Corruption will always be a serious problem in every country, because corruption is the biggest challenge that can hinder the progress and development of the Nation. The aim of this research is to shape the nation's generation so that it becomes a generation that can create a much better country. Generation Z or the next generation are the nation's successors who have an important role in creating a society that is free from corrupt practices. By using the Pancasila ethical system, the next generation of the Nation can express that Pancasila values, such as social justice, honesty and mutual cooperation are the perfect foundation for building a young generation with integrity. using qualitative methods in the nature of literature studies as a research method. Literature study means collecting information by reading, recording, and processing materials and data from various sources, such as books, scientific journals, and research articles with literature review. The implementation of Pancasila ethics through formal education, the role of the family, and strengthening national values in daily life is considered effective in forming an anti-corruption character. The conclusion of this research is that the formation of an anti-corruption character in Generation Z in Indonesia is very important in efforts to overcome serious corruption problems and create a society with more integrity and responsibility.

Keywords: *Anti-Corruption Education, Generation Z, Ethics, and Pancasila.*

Abstrak :

Pada saat ini, banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa salah satu akar utama dalam korupsi adalah sistem politik dan partai politik. Korupsi akan selalu menjadi persoalan yang serius di tiap Negara, di karenakan korupsi merupakan sebuah tantangan terbesar yang bisa menghambat kemajuan dan perkembangan Bangsa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membentuk generasi Bangsa agar menjadi generasi yang dapat mewujudkan Negara yang jauh lebih baik. Generasi Z atau generasi selanjutnya ialah penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang bersih dari praktik korupsi. Dengan menggunakan sistem etika pancasila, generasi penerus Bangsa dapat mengungkapkan bahwa nilai-nilai pancasila, seperti keadilan sosial, kejujuran, dan gotong royong merupakan fondasi yang sempurna untuk membangun generasi muda yang berintegritas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi pustaka sebagai metode penelitian. Studi pustaka berarti mengumpulkan informasi dengan membaca, mencatat, dan mengolah bahan dan data dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel penelitian dengan kajian pustaka. Implementasi etika pancasila melalui pendidikan formal, peran keluarga, dan menguatkan nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari dinilai efektif untuk membentuk karakter anti korupsi. Kesimpulan dari riset tersebut adalah bahwa pembentukan

karakter anti korupsi pada Generasi Z di Indonesia sangat penting dalam usaha mengatasi masalah korupsi yang serius dan menciptakan masyarakat yang lebih berintegritas dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Pendidikan Anti Korupsi, Generasi Z, Etika, Pancasila.

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan dalam pembentukan karakter. Anti korupsi itu sendiri berarti sebuah tindakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan, baik itu di dalam perusahaan, kampus, sekolah, maupun di politik. Telah banyak kejadian dimana seseorang melakukan kecurangan untuk kesenangan mereka sendiri, tidak memikirkan apa yang mereka perbuat bisa berdampak terhadap lingkungan dan juga kehidupan mereka. Pendidikan anti korupsi ini bisa diterapkan dan dipelajari sejak dini, agar menanamkan karakter yang jujur, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain, belajar bertanggung jawab atas perbuatan mereka, dan mempunyai sifat yang peduli terhadap orang lain sesuai dengan norma pancasila. Pancasila merupakan sebuah rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia (Ilmiah & Pendidikan, 2023).

Keberadaan pancasila ini bukan hanya untuk pajangan di Indonesia, tetapi sebuah tujuan dalam membentuk kemakmuran dan keadilan di dalam Indonesia. Pancasila layaknya jiwa dari Indonesia, dengan lambang garuda yang membawa pita bertuliskan Bhineka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Maka, dengan begitu, pancasila sebagai dasar negara memiliki peran untuk membangun kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila untuk mempersatukan masyarakat Indonesia. Etika dinilai mulai dari cara kita bertindak dan dalam tutur bicara (Restianingsih Putri Rahayu, S.Psi., M.Kes. Anjeli Ratih Syamlingga Putri, S.Tr.Keb., 2023). Etika merupakan pertimbangan atau perhatian tingkah laku manusia dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan moral. Etika, bisa dilakukan dan dipelajari sejak kecil, belajar mengenai bagaimana menghormati orang yang jauh lebih tua, mendengarkan nasehat atau pendapat dengan baik, dan menjaga lisan kepada orang lain. Dengan menerapkan etika dan pancasila kepada generasi selanjutnya, dapat tercipta pemerintahan yang jauh lebih baik dan memberikan keadilan terhadap negara Indonesia ini.

Setiap generasi membayangkan dirinya lebih cerdas dibandingkan generasi sebelumnya, dan lebih bijaksana dibandingkan generasi setelahnya. Generasi Z ini lahir di era yang penuh tantangan, mulai dari isu terorisme, ketidakstabilan politik dunia, hingga isu lingkungan hidup. Generasi yang tumbuh di tengah munculnya internet, smartphone, dan media sosial yang semakin dominan, membuat mereka tidak hanya menggunakan teknologi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menggunakan teknologi sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, mencari informasi, dan bahkan membangun karir.

Dengan begitu, pembentukan karakter anti korupsi melalui pendidikan etika pancasila menjadi sangat penting. Generasi Z diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu membawa Bangsa Indonesia dari jeratan korupsi-korupsi yang merajalela. Penerapan nilai-nilai pancasila

perlu dilakukan melalui pendidikan formal maupun nonformal. Hal ini dapat menjadi wawasan baru bagi para siswa yang akan beranjak dewasa. Dalam konteks pemberantasan korupsi, etika Pancasila menawarkan prinsip-prinsip yang relevan untuk membentuk karakter generasi Z agar menjadi lebih bijaksana dalam mengartikan etika Pancasila. Dengan demikian, etika Pancasila bukan hanya sebuah slogan, tetapi juga panduan nyata dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembentukan Karakter

Pengembangan sikap, nilai, dan perilaku seseorang melalui interaksi sosial dan pendidikan disebut dengan pembentukan karakter. Menurut (Wanti Liku Limbong 1, Flowrensi Peby T.R 2, 2021) pendidikan karakter lebih baik dibentuk paling awal oleh keluarga kemudian di sekolah dan berlanjut ke masyarakat. Untuk melihat anak lebih baik, proses pembentukan karakternya mesti dibentuk sedini mungkin agar peran selanjutnya ke lingkungan sekolah dapat berlanjut dan lebih mudah di asah hingga ke masyarakat.

B. Anti Korupsi

Korupsi merupakan istilah yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi keempat, korupsi didefinisikan lebih spesifik lagi, yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan, organisasi, yayasan, politik, dan lainnya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut (Sulistyowati, 2024) korupsi adalah perilaku yang dilakukan oleh pejabat, yang secara tidak wajar dan tidak sah membuat diri mereka mendapatkan keuntungan dengan menyalahgunakan wewenang. Di Indonesia, secara kasat mata, kasus korupsi merupakan konsumsi publik yang dapat diperoleh melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Secara tegas hal tersebut diakui dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa korupsi di Indonesia tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Memberantas korupsi memang bukanlah pekerjaan yang gampang, karena pemberantasan korupsi memerlukan proses berlanjut yang harus dilaksanakan secara konsisten

C. Generasi Z

Generasi Z, yang lahir antara pertengahan 1990-an dan awal 2010-an, adalah kelompok yang tumbuh dalam era teknologi canggih dan digital. Generasi Z cenderung lebih sering menggunakan internet dan media sosial secara luas, yang berdampak pada cara mereka belajar, bekerja, dan berkomunikasi. Oleh karena itu, menurut (Putri et al., 2024) Generasi Z di Indonesia sangat membutuhkan perhatian. Sebagai calon pemimpin masa depan bangsa, penting bagi kita untuk menanamkan prinsip anti korupsi pada generasi ini. Hal ini akan membantu menjamin bahwa Indonesia tidak akan terpengaruh oleh korupsi di masa yang akan datang.

D. Sistem Etika Pancasila

Negara Indonesia merupakan Negara yang merdeka dan memiliki kedaulatan. Keberadaan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia tetap konsisten dan tidak tergoyahkan dalam membangun Negara Indonesia. Fungsi Pancasila yang berperan sebagai dasar Negara memuat sumber hukum, prinsip, moral, cita-cita nasional dan pembentuk jati diri Bangsa Indonesia. Selain itu, etika juga merupakan sifat yang terbentuk dari seseorang, mulai bagaimana dia bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan, dan bertutur kata yang sopan. Maka, etika Pancasila Menurut (Aini & Dewi, 2022) adalah seseorang yang membentuk karakter melalui nilai-

nilai Pancasila untuk menciptakan tindakan yang positif. Etika Pancasila menjadi landasan perilaku yang benar secara normatif dan secara hukum dapat memberikan kedudukan untuk meninjau kembali nilai-nilai dan kebiasaan yang ditanamkan di kalangan masyarakat. Jadi, kesimpulannya adalah dengan menggunakan sistem etika Pancasila ini, dapat memberi pengetahuan dan tindakan yang seharusnya ketika berhadapan dengan korupsi. Dengan menerapkannya, generasi-generasi selanjutnya akan memahami bagaimana menghindari korupsi yang dapat dilakukan melalui hal-hal kecil tanpa disadari.

METODOLOGI PENELITIAN

Dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi pustaka sebagai metode penelitian. Studi pustaka berarti mengumpulkan informasi dengan membaca, mencatat, dan mengolah bahan dan data dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel penelitian, untuk mendapatkan informasi, melakukan proses analisis, dan membuat kesimpulan. Penelitian ini membahas tentang pentingnya Pembentukan Karakter Anti Korupsi Pada Generasi Z dengan Sistem Etika Pancasila, sehingga Generasi Z diharapkan dapat membentuk karakter anti korupsi.

PEMBAHASAN

A. Pembentukan Karakter Anti Korupsi Pada Generasi Z

Generasi Z, atau yang dikenal juga sebagai generasi digital, adalah generasi yang lahir sebagai hasil dari kemajuan teknologi dan sangat bergantung pada teknologi. Generasi ini muncul dari tahun 1995 hingga 2010. Mereka sudah terbiasa dengan banyak jenis perangkat dan aplikasi. Hal ini dapat memengaruhi kepribadian dan perilaku seseorang. Selain kelebihan, Generasi Z memiliki kelemahan, seperti kurangnya keterampilan komunikasi verbal dan kecenderungan mereka untuk hal-hal yang instan.

Untuk membangun karakter anti korupsi pada Generasi Z, sangat penting dilakukan agar terbentuknya masyarakat yang berintegritas. Pendidikan berbasis nilai yang mengutamakan etika dan integritas dapat membentuk sikap anti korupsi melalui pemahaman tentang konsekuensi buruk dari perilaku korupsi (Fachrur Rozi et al., 2024). Selain itu, peran teladan dari orang tua, guru, dan figur publik membantu membentuk pola pikir positif. Generasi Z juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam gerakan anti korupsi, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di masyarakat melalui penggunaan teknologi. Untuk membangun moral yang kuat dan kesadaran terhadap efek korupsi, pendidikan karakter dan anti korupsi harus diterapkan secara bersamaan.

B. Cara Mengurangi Tindakan Korupsi Pada Generasi Z

Tidak jelas seberapa efektif pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran anti korupsi Generasi Z. Studi menunjukkan bahwa pendidikan formal tidak memasukkan hukum dan etika anti korupsi ke dalam kurikulum. Selain itu, teknologi digital yang pesat telah menimbulkan tantangan baru untuk memastikan bahwa Generasi Z menerima pesan anti korupsi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan penyelidikan lebih lanjut tentang persepsi Generasi Z terhadap peran pendidikan hukum dalam membentuk kesadaran anti korupsi.

Dengan mengetahui perspektif mereka, kita dapat menemukan kesalahan dalam metode pendidikan hukum saat ini dan membuat metode yang lebih baik untuk menyampaikan pesan anti korupsi kepada generasi muda. Ini akan berkontribusi pada pembentukan fondasi yang lebih kuat yang akan membantu mencegah korupsi di masa depan dan menciptakan masyarakat yang lebih

baik dan jujur. Dalam teori hukum, pendidikan hukum berkaitan dengan konsep hukum positif dan hukum yang adil.

Konsep hukum positif menekankan bahwa aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas harus diterapkan, sedangkan hukum yang adil menekankan bahwa penerapan hukum harus adil dan setara. Dalam hal pencegahan korupsi, teori hukum juga mencakup konsep keadilan sosial dan kepatuhan terhadap hukum. Dengan memahami teori hukum ini, pendidikan hukum dapat dirancang untuk menanamkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kepatuhan terhadap hukum. Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran anti korupsi di kalangan Generasi Z dengan memberikan landasan teoritis yang kuat dan mendorong sikap dan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang positif dan adil. (Mnune & Saingo, 2023). Adapun pencegahan korupsi menurut (Bastri, 2022).

1. Hidup Sesuai Kemampuan

Kita sering merasa tidak cukup dan menjalani gaya hidup yang tidak wajar atau melebihi kemampuan kita, yang mendorong kita untuk korupsi. Hentikan membandingkan diri Anda dengan orang lain.

2. Mengatur Manajemen Waktu

Disiplin waktu untuk menjalani kegiatan sehari-hari dapat membantu merencanakan kegiatan sehari-hari dengan baik dan tepat waktu, sehingga mengurangi korupsi waktu.

Fokus Kepada Kinerja Dan Tanggung Jawab Pribadi

Selesaikan segala pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan aturan atau kesepakatan yang ada. Dengan demikian, kita akan mematuhi aturan untuk mengurangi korupsi.

3. Mengatur Pengeluaran

Catat pengeluaran sehari-hari Anda dan tentukan kebutuhan dan keinginan Anda. Jika masih ada sisa yang dapat digunakan untuk keinginan, bersiaplah untuk memenuhi kebutuhan terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan menjalani gaya hidup sederhana.

4. Selalu Bersyukur

Bersyukur atas apa yang kita miliki dan apa yang telah kita capai hari ini dapat membantu kita menghindari korupsi. Ini akan membawa kita ke dalam perilaku dan perbuatan yang menyimpang jika kita tidak bersyukur, selalu mencari kekurangan, atau tidak pernah merasa puas.

C. Nilai – Nilai Anti Korupsi

Untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari korupsi, kita semua harus berpegang pada prinsip anti korupsi. KPK mengumumkan sembilan prinsip utama:

1. Jujur

Kejujuran adalah sikap yang jujur dan tulus yang melakukan tugas yang diberikan dengan benar, tanpa menipu atau mengubah fakta. Jujur adalah salah satu prinsip utama anti korupsi dalam berbagai aspek kehidupan (Mnune & Saingo, 2023). Sebagai contoh, seorang siswa harus menjaga martabat akademisnya dengan menghindari plagiarisme, mencontek, atau memalsukan pelajaran.

2. Peduli

Peduli berarti menunjukkan perhatian atau kepedulian untuk membantu atau memperbaiki situasi serta memperhatikan dan merasa tanggung jawab atas sesuatu atau seseorang.

3. Mandiri

Mandiri berarti memiliki kemampuan untuk bertindak secara mandiri dan membuat keputusan berdasarkan kepentingan masyarakat tanpa terpengaruh oleh faktor luar. Seseorang yang mandiri adalah kreatif, inisiatif, dan mampu mengambil keputusan sendiri tanpa bantuan orang lain.

4. Disiplin

Kemampuan untuk menjalankan kewajiban atau tugas dengan konsisten, tepat waktu, dan sesuai dengan aturan yang berlaku adalah contoh disiplin. Disiplin juga mencakup sikap tegas terhadap diri sendiri dalam mengontrol perilaku, mengikuti aturan, dan bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban yang dilakukan.

5. Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah rasa tanggung jawab untuk melakukan tugas atau peran tertentu dan siap menerima konsekuensi dari tindakan tersebut. Orang yang bertanggung jawab akan menyelesaikan tugasnya dengan penuh perhatian dan siap mempertanggungjawabkan hasil atau keputusan yang mereka buat.

6. Kerja keras

Menunjukkan dedikasi dan upaya maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka sebagai pelayan masyarakat. Mereka yang rajin berkonsentrasi pada kebutuhan nyata dan keberhasilan dalam pekerjaan mereka, jadi mereka tidak akan tertarik dengan gaya hidup mewah atau berlebihan.

7. Sederhana

Sederhana adalah menghindari pemborosan sumber daya. Perilaku ini akan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan Anda dengan menghindari pemborosan yang tidak perlu.

8. Berani

Berani menghadapi tekanan dari berbagai pihak dan tetap teguh pada integritas. Jika keberanian didasarkan pada kebenaran tentang apa yang terjadi, orang yang berani akan selalu menentang korupsi.

9. Adil

Adil adalah sama rata, tidak bias, dan tidak memihak. memastikan bahwa kebijakan dan pelayanan tersedia dan bermanfaat bagi semua warga tanpa pengecualian. Untuk menghindari konflik kepentingan yang sering menyebabkan korupsi, perspektif adil ini sangat penting

D. Alasan Diberlakukannya Sistem Etika Pancasila

Etika adalah pemikiran kritis yang mendasar tentang prinsip dan perspektif moral. etika adalah bidang yang mempelajari bagaimana dan mengapa kita mengikuti ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab terhadap berbagai ajaran moral, karena pancasila membentuk dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi semua warga Indonesia. Menurut (Muallif, 2022) Etika adalah bidang filosofi yang berfokus pada nilai-nilai dan moralitas, yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Etika pancasila didasarkan pada nilai-nilai pancasila, yang mencakup nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Etika pancasila dapat berfungsi sebagai filter dalam menghadapi masalah modern seperti diskriminasi, ketidakadilan, dan pengaruh budaya asing. Nilai-nilai ini mendorong masyarakat untuk mencari solusi konflik melalui musyawarah dan keadilan, yang menghasilkan masyarakat

yang lebih adil dan toleran. Oleh karena itu, memilih sistem etika Pancasila untuk membangun karakter anti korupsi pada Generasi Z merupakan tindakan yang strategis.

E. Sila – Sila Pancasila Membentuk Sistem Etika Pancasila

Sebagai sistem etika, Pancasila memberikan pedoman moral bagi masyarakat Indonesia. Setiap sila memiliki makna yang mendalam.

1. Ketuhanan yang Maha Esa menekankan spiritualitas dan ketaatan pada prinsip agama, dan mendorong orang untuk hidup sesuai dengan ajaran Tuhan.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menghargai martabat manusia dan mendorong perilaku humanis dalam interaksi sosial.
3. Persatuan Indonesia mengedepankan solidaritas dan kebersamaan dalam keragaman, serta memperkuat rasa nasionalisme.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menciptakan keadilan sosial dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
5. Keadilan Sosial untuk Semua Orang Indonesia meletakkan kesejahteraan dan pemerataan sebagai dasar kebijakan publik.

F. Tantangan Sistem Etika Pancasila Dalam Pemerintahan Indonesia

Penerapan Pancasila sebagai sistem etika menghadapi beberapa tantangan besar di Indonesia. Berikut penjelasan rinci mengenai tantangan-tantangan tersebut:

1. Otoritarianisme dalam Pemerintahan

Otoritarianisme terjadi apabila kekuasaan terpusat pada segelintir orang atau kelompok sehingga meniadakan prinsip demokrasi yang dianut Pancasila. Pemerintahan otoriter cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat, membatasi kebebasan berekspresi, dan menghilangkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, lemahnya kontrol sosial, dan pengkhianatan terhadap nilai inti keempat: masyarakat yang dipandu oleh kebijaksanaan dalam pertimbangan dan ekspresi.

2. Korupsi

Korupsi menggerogoti prinsip keadilan sosial yang diatur dalam sila kelima Pancasila. Ketika pejabat menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi, mereka mengkhianati tanggung jawabnya kepada masyarakat. Hal ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat pembangunan, dan meningkatkan kesenjangan sosial.

3. Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya ekonomi melanggar prinsip keadilan sosial. Bidang-bidang tertentu, seperti pendidikan dan kesehatan, seringkali hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang kaya secara ekonomi. Menimbulkan kecemburuan sosial, meningkatkan angka kemiskinan, dan memperburuk kemerosotan sosial.

4. Runtuhnya Suatu Negara

Runtuhnya suatu bangsa terjadi apabila persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang diajarkan dalam sila ketiga Pancasila tidak dipertahankan. Hal ini seringkali disebabkan oleh faktor seperti konflik suku, agama, ras, antar golongan (SARA) dan perbedaan pandangan politik. Hal ini berujung pada konflik horizontal, fragmentasi sosial, dan melemahnya stabilitas nasional.

5. Terorisme

Terorisme bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Teroris seringkali menggunakan ideologi tertentu untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap

sesama warga negaranya. Hal ini menggerogoti rasa aman masyarakat, merusak persatuan bangsa, dan merusak citra Indonesia di mata dunia.

6. *Ketidakadilan Hukum*

Ketidakadilan hukum terjadi ketika sistem peradilan tidak memberikan keadilan yang setara kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh suap, diskriminasi, atau keragu-raguan di pihak aparat penegak hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum melemah, ketidakpuasan sosial muncul, dan ketidakadilan sosial semakin parah. (Indah Jumadila Khairani et al., 2024)

SIMPULAN

Kesimpulan dari riset tersebut adalah bahwa pembentukan karakter antikorupsi pada Generasi Z di Indonesia sangat penting dalam usaha mengatasi masalah korupsi yang serius dan menciptakan masyarakat yang lebih berintegritas dan bertanggung jawab. Penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam membentuk sikap anti korupsi, dengan menekankan nilai-nilai seperti keadilan sosial, kejujuran, dan gotong royong. Pendidikan formal dan nonformal, serta peran keluarga, sangat krusial dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ini.

Riset ini menyoroti bahwa Generasi Z, sebagai generasi digital yang dipengaruhi oleh teknologi, memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam melawan korupsi. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan yang menekankan etika dan integritas, di mana Generasi Z diajarkan untuk memahami konsekuensi negatif dari praktik korupsi. Oleh karena itu, upaya pendidikan anti korupsi harus diprioritaskan demi membangun karakter yang kuat, dan untuk memiliki kesadaran akan pentingnya integritas di kalangan generasi muda, agar mendukung Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. Q., & Dewi, D. A. (2022). Sistem Etika Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. 6, 11120–11125.
- Basri. (2022). Mulai dari Diri Sendiri dan dari Hal Terkecil, Kita Bisa Lawan Korupsi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15689/Mulai-dari-Diri-Sendiri-dan-dari-Hal-Terkecil-Kita-Bisa-Lawan-Korupsi.html>
- Fachrur Rozi, A., Amalia Yanuartha, R., & Purnomo, D. (2024). Pengaruh Integritas dan Anti Korupsi terhadap Moral Generasi Z Kota Salatiga. Daru Purnomo INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 4, 8746–8760.
- Ilmiah, J., & Pendidikan, K. (2023). JURNAL GLOBAL CITIZEN. 1.
- Indah Jumadila Khairani, Nur Zakiah Pulungan, & Monica Ayu Dia. (2024). Pancasila Sebagai Sistem Etika. Guruku: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora, 2(3), 103–113. <https://doi.org/10.59061/guruku.v2i3.694>
- Mnune, O. P. D., & Saingo, Y. A. (2023). Karakter Jujur Sebagai Aktualisasi Nilai Pancasila. Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu, 2(4), 2097–2106.
- Muallif. (2022). Pengertian etika menurut ahli. Universitas Islam an Nur Lampung. <https://an-nur.ac.id/pengertian-etika-menurut-ahli/>
- Putri, K. F., Aura, A., & Putri, A. (2024). Persepsi Generasi Z Terhadap Peran Pendidikan Hukum Dalam Membentuk Kesadaran Antikorupsi. 06(04), 20693–20700.

-
- Restianingsih Putri Rahayu, S.Psi., M.Kes. Anjeli Ratih Syamlingga Putri, S.Tr.Keb., M. K. (2023). Pancasila sebagai ideologi dan dasarnegara. PT Nasya Expanding Management (Penerbit NEM - Anggota IKAPI). https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Etika_dan_Perilaku_Kesehatan/kf_NEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=etika+adalah&pg=PA1&printsec=frontcover
- Sulistyowati, D. A. (2024). Pendidikan budaya anti korupsi (T. Media (ed.); Pertama). Tahta media group.
- Wanti Liku Limbong 1, Flowrensi Peby T.R 2, I. S. T. (2021). Pembentukan karakter anti korupsi bermuatan kearifan lokal di siswa sdn 120 buntu masakke. 319–326.